

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

BP Lawyers Dapat Membantu Anda

Kami dapat membantu Anda dalam memberikan solusi terbaik atas permasalahan izin produksi pangan anda atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Izin Edar BPOM.

Anda dapat menghubungi kami melalui:

Our Contact

☎ +62 21 8067 4920
☎ +62 821 1000 4741
✉ ask@bplawyers.co.id

Our Office

LEGALO
18 Office Park, Lantai 10 Lot A
Jl. TB Simatupang No 18
Kebagusan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
4. Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
5. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
7. Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat CPPB-IRT adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan bagi IRTP untuk memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak dikonsumsi.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

8. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
9. Kemasan Pangan Primer adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan yang bersentuhan langsung dengan pangan.
10. Kemasan Pangan Sekunder adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, yang tidak bersentuhan langsung dengan pangan.
11. Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi PKP yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten.
12. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector/DFI*) adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI, yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRTP dalam rantai pangan dari organisasi yang kompeten.
13. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
14. Nomor P-IRT adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

**BAB II
PEMBERIAN SPP-IRT**

Pasal 2

- (1) SPP-IRT diberikan oleh Bupati/Walikota.
- (2) SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah IRTP memenuhi persyaratan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan:
 - a. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan; dan
 - b. Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- (4) Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 3

- (1) SPP-IRT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (2) Pangan Produksi IRTP yang SPP-IRT telah berakhir masa berlakunya dilarang untuk diedarkan.

Pasal 4

Setiap pemberian SPP-IRT, Bupati/Walikota menyampaikan informasi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Badan.

Pasal 5

Pemberian SPP-IRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mengacu kepada Pedoman Pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB III
JENIS PANGAN**

Pasal 6

Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1640 tahun 2003 tentang Pedoman Tata Cara Penyelegaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2012
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY OEMAR SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

**PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA**

A. PENDAHULUAN

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka **produksi dan peredaran** pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan - sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, mengamanatkan bahwa pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

Mengingat hal tersebut di atas, dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

B. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

C. JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT

Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT seperti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

D. TATA CARA PEMBERIAN SPP-IRT

1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT

Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi :

- (1) Formulir Permohonan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 1 yang memuat informasi sebagai berikut :
 - (a) Nama jenis pangan
 - (b) Nama dagang
 - (c) Jenis kemasan
 - (d) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)
 - (e) Komposisi
 - (f) Tahapan produksi
 - (g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP
 - (h) Nama pemilik
 - (i) Nama penanggungjawab
 - (j) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa)
 - (k) Informasi tentang kode produksi
- (2) Dokumen lain antara lain :
 - (a) Surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang berwenang
 - (b) Rancangan label pangan

2. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan

- a) Penyelenggara Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota .
- b) Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Badan POM dan ditugaskan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
- c) Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Balai Besar/Balai POM setempat.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- d) Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan
Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP.
Contoh Daftar Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 2.
- e) Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari :
- (1) Materi Utama
 - (a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan
 - (b) Keamanan dan Mutu pangan
 - (c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan
 - (d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (Standard Sanitation Operating Procedure /SSOP)
 - (e) Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).
 - (f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)
 - (g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan
 - (2) Materi Pendukung
 - (a) Pencantuman label Halal
 - (b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP
- f) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan
Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan.
- g) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 3
- (1) Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/penanggungjawab yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi **minimal nilai cukup (60)**
 - (2) Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut :
Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut :
- 123 / 4567 / 89**
- Keterangan penomoran adalah sebagai berikut :
- (a) angka ke-1,2,3 pada Kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (b) angka ke-4,5,6,7 pada Kolom II, menunjukkan propinsi dan kabupaten/kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan
 - (c) angka ke-8,9 pada Kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat
- h) Contoh laporan penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 4.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

3. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- Pemeriksaan sarana dilakukan setelah pemilik atau penanggungjawab telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan
 - Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector/DFI*) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi pengawas pangan dari Badan POM.
 - Pemeriksaan sarana produksi IRTP sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
 - Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I – II maka diberikan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 5.

4. Pemberian Nomor P-IRT

- Nomor P-IRT **minimal** terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut :

P-IRT No. 1234567890123-45

- Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut :
 - digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan sesuai Sub Lampiran 6
 - digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan IRTP sesuai Sub Lampiran 7
 - digit ke- 4,5,6 dan 7 menunjukkan kode provinsi dan kabupaten/kota sesuai Sub Lampiran 8
 - digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT
 - digit ke- 10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku
- Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT.
- Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan provinsi, kabupaten/kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode provinsi, kabupaten dan kota.

E. PERPANJANGAN SPP – IRT DAN PERUBAHAN PEMILIK

- Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
- Perubahan Pemilik/Penanggungjawab
Perubahan pemilik/penanggungjawab IRTP harus dilaporkan pada Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

F. PENCABUTAN SPP – IRT

SPP-IRT dicabut oleh Bupati/Walikota **c.q. Dinas** Kesehatan **Kabupaten/Kota** apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut :

1. Pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku
2. Pangan terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan
3. Pangan mengandung Bahan Berbahaya
4. Sarana terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRTP

G. MONITORING SPP-IRT

Bupati/Walikota **cq. Dinas** Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring terhadap pemenuhan persyaratan SPP-IRT yang telah diterbitkan minimal 1 (satu) kali dalam setahun

H. SISTEM PENDATAAN DAN PELAPORAN

1. Pemberian SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati/Walikota **cq. Dinas** Kesehatan Kabupaten/Kota kepada **Dinas** Kesehatan Propinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat.
Contoh daftar IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT tercantum dalam Sub Lampiran 9.
2. Pencabutan SPP-IRT diinformasikan oleh Bupati/Walikota **cq. Dinas** Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat.
3. Penyampaian informasi tentang pemberian dan pencabutan SPP-IRT serta perubahan dan penambahan jenis produk pangan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY OEMAR SAID



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 1

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| LOGO PEMDA KAB/KOTA*) | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) DINAS KESEHATAN KAB/KOTA Jl. KABUPATEN/KOTA *..... KODE POS TELP : FAX : E-MAIL : | LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA |
|-----------------------------|--|--|

FORMULIR

**PERMOHONAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
(SPP-IRT)**

1. Nama jenis pangan :
(sesuai nama jenis pangan IRT)
2. Nama dagang :
3. Jenis kemasan :
4. Berat bersih/isi bersih :
(g/mg/kg atau l/ml/kl)
5. Komposisi :
6. Proses Produksi :
7. Informasi tentang masa simpan :
(kedaluwarsa)
8. Informasi tentang kode produksi :
9. Nama, alamat, kode pos :
dan nomor telepon IRTP :
.....
10. Nama pemilik :
11. Nama penanggungjawab :

.....,
Pemilik/ Penanggungjawab

ttd

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 2

**DAFTAR PESERTA
PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN
SPP-IRT**

| NO | NAMA | JABATAN (PEMILIK / PENANGGUNGJAWAB) | SERTIFIKAT PKP NO. : | NAMA DAN ALAMAT IRTP | NILAI |
|-----------|-------------|--|---------------------------------|---|--------------|
| | | | | | |

.....,,
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
KEPALA,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 3

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| LOGO PEMDA KAB/KOTA*) | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) DINAS KESEHATAN KAB/KOTA Jl. KABUPATEN/KOTA *) KODE POS TELP : FAX : E-MAIL : | LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA |
|-----------------------------|--|--|

SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

NOMOR : . . . / / . .

Diberikan kepada :

Nama :

Jabatan : Pemilik / Penanggungjawab *)

Alamat :

Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK. tanggal yang diselenggarakan di :

Kabupaten/Kota *) :

Propinsi :

Pada tanggal : s/d

.....,
Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.....*)

ttd

(.....

*) Coret yang tidak perlu



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 4

CONTOH

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PEMBERIAN
SPP-IRT**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. tanggal tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT, Pemerintah Kabupaten/Kota*)cq. Dinas Kesehatan Kab/Kota, telah menyelenggarakan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian SPP-IRT pada tanggal s/d dengan jumlah peserta orang.

Kepada pemilik / penanggungjawab IRTP yang mengikuti PKP dalam rangka pemberian SPP-IRT dengan baik telah diberikan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Nomor s/d

Sedangkan kepada IRTP yang produk pangannya telah memenuhi persyaratan SPP-IRT telah diberikan SPP-IRT seperti terlampir.

Penyelenggaraan PKP dan pemberian SPP-IRT telah sesuai.

.....,
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
KEPALA,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 5

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| LOGO PEMDA KAB/KOTA*) | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) DINAS KESEHATAN KAB/KOTA Jl. KABUPATEN/KOTA *) KODE POS TELP : FAX : E-MAIL : | LOGO DINAS KESEHATAN KAB/KOTA |
|-----------------------------|--|--|

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

P-IRT NO.

Diberikan kepada :

Nama IRT :

Nama Pemilik :

Alamat :

Jenis Pangan :
(sesuai nama jenis pangan IRT)

Kemasan Primer :

Yang telah memenuhi persyaratan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK. tanggal yang diselenggarakan di :

Kabupaten/Kota *) :

Propinsi :

Pada tanggal : s/d

.....,

Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.....*)

ttd

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 6

KODE KEMASAN PRIMER PANGAN IRT

| KODE | JENIS KEMASAN | KETERANGAN |
|-------------|------------------------|---|
| 1 | Gelas (<i>Glass</i>) | Bukan untuk pangan yang disterilisasi |
| 2 | Plastik | Bukan untuk pangan yang disterilisasi atau pasteurisasi |
| 3 | Karton / Kertas | |
| 4 | Kaleng | Bukan untuk pangan yang disterilisasi |
| 5 | Aluminium Foil | |
| 6 | Lain-lain | Misalnya daun |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 7

KODE JENIS PANGAN YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT

| KODE | JENIS PANGAN |
|-------------|------------------------------------|
| 01 | HASIL OLAHAN DAGING KERING |
| | Abon Daging |
| | Dendeng Daging |
| | Paru Goreng Kering |
| | Kerupuk Kulit |
| | Rendang Daging / Paru |
| 02 | HASIL OLAHAN IKAN KERING |
| | Abon |
| | Cumi Kering |
| | Ikan Asin |
| | Ikan Asap / Ikan Salai / Ikan Kayu |
| | Kerupuk / Kemplang / Amplang Ikan |
| | Udang Kering (Ebi) |
| | Pasta Ikan |
| | Petis |
| | Terasi |
| | Empek-empek kering |
| | Ikan goreng |
| | Dendeng Ikan |
| | Rendang Ikan / Belut |
| | Serundeng Ikan |
| | Bekicot Olahan |
| | Presto Ikan |
| 03 | HASIL OLAHAN UNGGAS KERING |
| | Abon unggas |
| | Usus Goreng |
| | Ceker Goreng |
| | Kulit unggas Goreng |
| | Dendeng |
| | Telur Asin |
| | Presto Unggas |
| | Rendang Telur |
| 04 | SAYUR ASIN DAN SAYUR KERING |
| | Acar |
| | Asinan/ Manisan Sayur |
| | Jamur Asin / Kering |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| KODE | JENIS PANGAN |
|-------------|---|
| | Sayur Asin Kering |
| | Sayur Kering |
| | Keripik / Criping Sayur |
| | Emping Melinjo / Labu |
| | Manisan Rumput Laut |
| | |
| 05 | HASIL OLAHAN KELAPA |
| | Kelapa Parut Kering |
| | Nata de Coco |
| | Geplak |
| | |
| 06 | TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA |
| | Bihun |
| | Biskuit |
| | Bagelen / Bagelan |
| | Dodol / Jenang / Galamai |
| | Kerupuk |
| | Kue Brem |
| | Kue Kering |
| | Makaroni |
| | Mie Kering |
| | Tapioka |
| | Tepung Aren |
| | Tepung Arcis |
| | Tepung Beras / Ketan |
| | Tepung Gandum (bukan tepung terigu yang wajib SNI) |
| | Tepung Hunkwee |
| | Tepung Kedele |
| | Tepung Kelapa |
| | Tepung Kentang |
| | Tepung Pisang |
| | Tepung Sagu |
| | Tepung Sukun |
| | Roti / Bluder |
| | Rempeyek / Peyek |
| | Sohun |
| | Bakpao |
| | Bakpia / Pia |
| | Bika Ambon |
| | Cakue |
| | Cendol |
| | Cimol |
| | Cone / Wadah Es Krim yang dapat dimakan (<i>edible</i>) |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| KODE | JENIS PANGAN |
|-------------|--|
| | Kulit Lumpia / Pangsit |
| | Moci |
| | Molen / Bolen |
| | Mutiara / Pacar Cina |
| | Pilus |
| | Yangko |
| | |
| 07 | MINYAK DAN LEMAK |
| | Minyak Jagung |
| | Minyak Kacang |
| | Minyak Kedele |
| | Minyak Kelapa |
| | Minyak Bunga Matahari |
| | Minyak Zaitun |
| | Minyak Sawit |
| | Minyak/ lemak ayam |
| | Minyak/ lemak sapi |
| | |
| 08 | SELAI, JELI DAN SEJENISNYA |
| | Jem / Selai |
| | Jeli buah |
| | Jeli agar |
| | Jeli bubuk rasa buah |
| | Jeli Rumput Laut |
| | Jeli Lidah Buaya |
| | Marmalad |
| | Serikaya / Srikaya / Kayakaya |
| | Cincau |
| | |
| 09 | GULA, KEMBANG GULA DAN MADU |
| | Gula Aren |
| | Gula Kelapa |
| | Gula Pasir (bukan gula pasir yang dirafinasi) |
| | Gula Semut |
| | Kembang Gula / Permen |
| | Kembang Gula / Permen Susu |
| | Kembang Gula / Permen Karet |
| | Kembang Gula Coklat |
| | Madu |
| | Sirop |
| | Manisan / Aromanis (buah / rimpang) |
| | Enting-enting / Kipang Kacang / Ampyang / Noga |
| | |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| KODE | JENIS PANGAN |
|-------------|--|
| 10 | KOPI, TEH, COKLAT KERING ATAU CAMPURANNYA |
| | Kopi Biji Kering / Bubuk |
| | Teh / Teh Hijau |
| | Teh Rosela |
| | Coklat (tidak termasuk coklat bubuk) |
| | Kopi Campur |
| | |
| 11 | BUMBU |
| | Aneka Bumbu Masakan |
| | Bumbu Cabe |
| | Bawang Goreng |
| | Cuka makan seperti cuka buah apel/ anggur, dll |
| | Kecap Asin / Manis |
| | Saos Cabe |
| | Saos Tomat |
| | Saos Ikan |
| | Saos Kacang |
| | Tauco |
| | Sambal |
| | Bumbu Kacang / Pecel |
| | |
| 12 | REMPAH-REMPAH |
| | Bawang Merah Kering / Pasta / Bubuk |
| | Bawang Putih Kering / Pasta / Bubuk |
| | Cabe Kering / Pasta / Bubuk |
| | Cengkeh Kering / Pasta / Bubuk |
| | Jahe Kering / Pasta / Bubuk |
| | Jintan |
| | Kayu Manis |
| | Kapulaga |
| | Ketumbar |
| | Kunyit Kering / Pasta / Bubuk |
| | Lada Putih / Hitam |
| | Pala / Bunga Pala |
| | Wijen |
| | |
| 13 | MINUMAN RINGAN, MINUMAN SERBUK |
| | Minuman Beraroma |
| | Minuman Gula Asam |
| | Minuman Buah |
| | Minuman Sayur |
| | Minuman Kacang Kedele / Sari Kedele |
| | Minuman Kopi / Campur |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| KODE | JENIS PANGAN |
|-------------|--|
| | Minuman Kunyit Asam |
| | Minuman Lidah Buaya |
| | Minuman Rumput Laut |
| | Minuman Sari Madu |
| | Minuman Sari Tebu |
| | Minuman Sari Jagung |
| | Minuman Sari Bekatul |
| | Minuman Sari Kurma |
| | Minuman Teh |
| | Minuman Bandrex |
| | Limun |
| | Minuman Jeli |
| | Minuman Rempah |
| | Minuman Rosela |
| | Cincau / Minuman Cincau |
| | Minuman Sari Tape |
| | Minuman Serbuk |
| | Minuman Bubuk Kedele |
| | |
| 14 | HASIL OLAHAN BUAH |
| | Keripik / Criping Buah (Sukun/Salak/Nangka/Mangga/ Pisang, dll) |
| | Buah Kering |
| | Lempok Buah (Durian, dll) |
| | Asinan Buah |
| | Buah Kering |
| | Manisan Buah |
| | Buah Dalam Sirop |
| | Pisang Sale |
| | |
| 15 | HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN DAN UMBI |
| | Ketan |
| | Jawadah / Jadah / Uli |
| | Keripik Kentang |
| | Keripik kentang Balado |
| | Keripik Ketela / Singkong |
| | Keripik / Tortilla Jagung |
| | Keripik Talas |
| | Intip |
| | Keripik Ubi Jalar |
| | Rangginang / Batiah |
| | Bekatul |
| | Bingka Ubi |
| | Carang mas / Kue Keremes Ubi Jalar / Ceker Ayam |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| KODE | JENIS PANGAN |
|-------------|---|
| | Jipang / Kipang Beras Ketan |
| | Berondong Jagung |
| | Berondong Beras Ketan |
| | Marning Jagung |
| | Emping Jagung / Singkong |
| | Keripik / Criping Umbi-umbian |
| | Getuk Goreng |
| | Kacang Atom / Bawang / Goreng / Kulit / Mete / Telur / Tolo / Koro / Kapri / Salut /Tumbuk |
| | Kwaci |
| | Opak / Gropak singkong / ubi / beras |
| | Singkong Presto |
| | Lanting |
| | Abon Oncom |
| | Tape Ketan |
| | Tape Singkong |
| | Tiwul |
| | Wingko Babat |
| | Wajik / Wajit ketan |
| | Wajik / Wajit buah |
| | |
| 16 | LAIN-LAIN ES |
| | Es Stik / Es Lilin |
| | Es Goyang / Es Loly |
| | Es Puter |
| | Es Mambo |
| | Es hunkue |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 8

KODE PROPINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

| No. Kode | Nama Propinsi | No. Kode | Nama Kabupaten/Kota |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1100 | Prov. Aceh | 1101 | Kab. Simeulue |
| | | 1102 | Kab. Aceh Singkil |
| | | 1103 | Kab. Aceh Selatan |
| | | 1104 | Kab. Aceh Tenggara |
| | | 1105 | Kab. Aceh Timur |
| | | 1106 | Kab. Aceh Tengah |
| | | 1107 | Kab. Aceh Barat |
| | | 1108 | Kab. Aceh Besar |
| | | 1109 | Kab. Pidie |
| | | 1110 | Kab. Bireuen |
| | | 1111 | Kab. Aceh Utara |
| | | 1112 | Kab. Aceh Barat Daya |
| | | 1113 | Kab. Gayo Lues |
| | | 1114 | Kab. Aceh Tamiang |
| | | 1115 | Kab. Nagan Raya |
| | | 1116 | Kab. Aceh Jaya |
| | | 1117 | Kab. Bener Meriah |
| | | 1118 | Kab. Pidie Jaya |
| | | 1171 | Kota Banda Aceh |
| | | 1172 | Kota Sabang |
| | | 1173 | Kota Langsa |
| | | 1174 | Kota Lhokseumawe |
| | | 1175 | Kota Subulussalam |
| 1200 | Prov. Sumatera Utara | 1201 | Kab. Nias |
| | | 1202 | Kab. Mandailing Natal |
| | | 1203 | Kab. Tapanuli Selatan |
| | | 1204 | Kab. Tapanuli Tengah |
| | | 1205 | Kab. Tapanuli Utara |
| | | 1206 | Kab. Toba Samosir |
| | | 1207 | Kab. Labuhan |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| No. Kode | Nama Propinsi | No. Kode | Nama Kabupaten/Kota |
|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | Batu |
| | | 1208 | Kab. Asahan |
| | | 1209 | Kab. Simalungun |
| | | 1210 | Kab. Dairi |
| | | 1211 | Kab. Karo |
| | | 1212 | Kab. Deli Serdang |
| | | 1213 | Kab. Langkat |
| | | 1214 | Kab. Nias Selatan |
| | | 1215 | Kab. Humbang Hasundutan |
| | | 1216 | Kab. Pakpak Bharat |
| | | 1217 | Kab. Samosir |
| | | 1218 | Kab. Serdang Bedagai |
| | | 1219 | Kab. Batu Bara |
| | | 1220 | Kab. Padang Lawas Utara |
| | | 1221 | Kab. Padang Lawas |
| | | 1222 | Kab. Labuhan Batu Selatan |
| | | 1223 | Kab. Labuhan Batu Utara |
| | | 1224 | Kab. Nias Utara |
| | | 1225 | Kab. Nias Barat |
| | | 1271 | Kota Sibolga |
| | | 1272 | Kota Tanjung Balai |
| | | 1273 | Kota Pematang Siantar |
| | | 1274 | Kota Tebing Tinggi |
| | | 1275 | Kota Medan |
| | | 1276 | Kota Binjai |
| | | 1277 | Kota Padang Sidempuan |
| | | 1278 | Kota Gunungsitoli |
| | | | |
| 1300 | Prov. Sumatera Barat | 1301 | Kab. Kepulauan Mentawai |
| | | 1302 | Kab. Pesisir Selatan |
| | | 1303 | Kab. Solok |
| | | 1304 | Kab. Sijunjung |
| | | 1305 | Kab. Tanah Datar |
| | | 1306 | Kab. Padang |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| No. Kode | Nama Propinsi | No. Kode | Nama Kabupaten/Kota |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | Pariaman |
| | | 1307 | Kab. Agam |
| | | 1308 | Kab. Lima Puluh Kota |
| | | 1309 | Kab. Pasaman |
| | | 1310 | Kab. Solok Selatan |
| | | 1311 | Kab. Dharmas Raya |
| | | 1312 | Kab. Pasaman Barat |
| | | 1371 | Kota Padang |
| | | 1372 | Kota Solok |
| | | 1373 | Kota Sawah Lunto |
| | | 1374 | Kota Padang Panjang |
| | | 1375 | Kota Bukittinggi |
| | | 1376 | Kota Payakumbuh |
| | | 1377 | Kota Pariaman |
| | | | |
| 1400 | Prov. Riau | 1401 | Kab. Kuantan Singingi |
| | | 1402 | Kab. Indragiri Hulu |
| | | 1403 | Kab. Indragiri Hilir |
| | | 1404 | Kab. Pelalawan |
| | | 1405 | Kab. Siak |
| | | 1406 | Kab. Kampar |
| | | 1407 | Kab. Rokan Hulu |
| | | 1408 | Kab. Bengkalis |
| | | 1409 | Kab. Rokan Hilir |
| | | 1410 | Kab. Kepulauan Meranti |
| | | 1471 | Kota Pekanbaru |
| | | 1473 | Kota Dumai |
| | | | |
| 1500 | Prov. Jambi | 1501 | Kab. Kerinci |
| | | 1502 | Kab. Merangin |
| | | 1503 | Kab. Sarolangun |
| | | 1504 | Kab. Batang Hari |
| | | 1505 | Kab. Muaro Jambi |
| | | 1506 | Kab. Tanjung Jabung Timur |
| | | 1507 | Kab. Tanjung Jabung Barat |
| | | 1508 | Kab. Tebo |
| | | 1509 | Kab. Bungo |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| No. Kode | Nama Propinsi | No. Kode | Nama Kabupaten/Kota |
|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | 1571 | Kota Jambi |
| | | 1572 | Kota Sungai Penuh |
| 1600 | Prov. Sumatera Selatan | 1601 | Kab. Ogan Komerling Ulu |
| | | 1602 | Kab. Ogan Komerling Ilir |
| | | 1603 | Kab. Muara Enim |
| | | 1604 | Kab. Lahat |
| | | 1605 | Kab. Musi Rawas |
| | | 1606 | Kab. Musi Banyu Asin |
| | | 1607 | Kab. Banyuasin |
| | | 1608 | Kab. Ogan Komerling Ulu Selatan |
| | | 1609 | Kab. Ogan Komerling Ulu Timur |
| | | 1610 | Kab. Ogan Ilir |
| | | 1611 | Kab. Empat Lawang |
| | | 1671 | Kota Palembang |
| | | 1672 | Kota Prabumulih |
| | | 1673 | Kota Pagar Alam |
| | | 1674 | Kota Lubuk Linggau |
| 1700 | Prov. Bengkulu | 1701 | Kab. Bengkulu Selatan |
| | | 1702 | Kab. Rejang Lebong |
| | | 1703 | Kab. Bengkulu Utara |
| | | 1704 | Kab. Kaur |
| | | 1705 | Kab. Seluma |
| | | 1706 | Kab. Mukomuko |
| | | 1707 | Kab. Lebong |
| | | 1708 | Kab. Kepahiang |
| | | 1709 | Kab. Bengkulu Tengah |
| | | 1771 | Kota Bengkulu |
| 1800 | Prov. Lampung | 1801 | Kab. Lampung Barat |
| | | 1802 | Kab. Tanggamus |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| No. Kode | Nama Propinsi | No. Kode | Nama Kabupaten/Kota |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | 1803 | Kab. Lampung Selatan |
| | | 1804 | Kab. Lampung Timur |
| | | 1805 | Kab. Lampung Tengah |
| | | 1806 | Kab. Lampung Utara |
| | | 1807 | Kab. Way Kanan |
| | | 1808 | Kab. Tulang Bawang |
| | | 1809 | Kab. Pesawaran |
| | | 1810 | Kab. Pringsewu |
| | | 1811 | Kab. Mesuji |
| | | 1812 | Kab. Tulang Bawang Barat |
| | | 1871 | Kota Bandar Lampung |
| | | 1872 | Kota Metro |
| | | | |
| 1900 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1901 | Kab. Bangka |
| | | 1902 | Kab. Belitung |
| | | 1903 | Kab. Bangka Barat |
| | | 1904 | Kab. Bangka Tengah |
| | | 1905 | Kab. Bangka Selatan |
| | | 1906 | Kab. Belitung Timur |
| | | 1971 | Kota Pangkal Pinang |
| | | | |
| 2100 | Prov. Kepulauan Riau | 2101 | Kab. Karimun |
| | | 2102 | Kab. Bintan |
| | | 2103 | Kab. Natuna |
| | | 2104 | Kab. Lingga |
| | | 2105 | Kab. Kepulauan Anambas |
| | | 2171 | Kota Batam |
| | | 2172 | Kota Tanjung Pinang |
| | | | |
| 3100 | Prov. D K I Jakarta | 3101 | Kab. Adm. Kepulauan Seribu |
| | | 3171 | Kodya Jakarta |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| No. Kode | Nama Propinsi | No. Kode | Nama Kabupaten/Kota |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| | | | Selatan |
| | | 3172 | Kodya Jakarta Timur |
| | | 3173 | Kodya Jakarta Pusat |
| | | 3174 | Kodya Jakarta Barat |
| | | 3175 | Kodya Jakarta Utara |
| | | | |
| 3200 | Prov. Jawa Barat | 3201 | Kab. Bogor |
| | | 3202 | Kab. Sukabumi |
| | | 3203 | Kab. Cianjur |
| | | 3204 | Kab. Bandung |
| | | 3205 | Kab. Garut |
| | | 3206 | Kab. Tasikmalaya |
| | | 3207 | Kab. Ciamis |
| | | 3208 | Kab. Kuningan |
| | | 3209 | Kab. Cirebon |
| | | 3210 | Kab. Majalengka |
| | | 3211 | Kab. Sumedang |
| | | 3212 | Kab. Indramayu |
| | | 3213 | Kab. Subang |
| | | 3214 | Kab. Purwakarta |
| | | 3215 | Kab. Karawang |
| | | 3216 | Kab. Bekasi |
| | | 3217 | Kab. Bandung Barat |
| | | 3271 | Kota Bogor |
| | | 3272 | Kota Sukabumi |
| | | 3273 | Kota Bandung |
| | | 3274 | Kota Cirebon |
| | | 3276 | Kota Depok |
| | | 3277 | Kota Cimahi |
| | | 3278 | Kota Tasikmalaya |
| | | 3279 | Kota Banjar |
| | | | |
| 3300 | Prov. Jawa Tengah | 3301 | Kab. Cilacap |
| | | 3302 | Kab. Banyumas |
| | | 3303 | Kab. Purbalingga |
| | | 3304 | Kab. Banjarnegara |
| | | 3305 | Kab. Kebumen |
| | | 3306 | Kab. Purworejo |
| | | 3307 | Kab. Wonosobo |
| | | 3308 | Kab. Magelang |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| No. Kode | Nama Propinsi | No. Kode | Nama Kabupaten/Kota |
|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | 3309 | Kab. Boyolali |
| | | 3310 | Kab. Klaten |
| | | 3311 | Kab. Sukoharjo |
| | | 3312 | Kab. Wonogiri |
| | | 3313 | Kab. Karanganyar |
| | | 3314 | Kab. Sragen |
| | | 3315 | Kab. Grobogan |
| | | 3316 | Kab. Blora |
| | | 3317 | Kab. Rembang |
| | | 3318 | Kab. Pati |
| | | 3319 | Kab. Kudus |
| | | 3320 | Kab. Jepara |
| | | 3321 | Kab. Demak |
| | | 3322 | Kab. Semarang |
| | | 3323 | Kab. Temanggung |
| | | 3324 | Kab. Kendal |
| | | 3325 | Kab. Batang |
| | | 3326 | Kab. Pekalongan |
| | | 3327 | Kab. Pemasang |
| | | 3328 | Kab. Tegal |
| | | 3329 | Kab. Brebes |
| | | 3371 | Kota Magelang |
| | | 3372 | Kota Surakarta |
| | | 3373 | Kota Salatiga |
| | | 3374 | Kota Semarang |
| | | 3375 | Kota Pekalongan |
| | | 3376 | Kota Tegal |
| | | | |
| 3400 | Prov. D I Yogyakarta | 3401 | Kab. Kulon Progo |
| | | 3402 | Kab. Bantul |
| | | 3403 | Kab. Gunung Kidul |
| | | 3404 | Kab. Sleman |
| | | 3471 | Kota Yogyakarta |
| | | | |
| 3500 | Prov. Jawa Timur | 3501 | Kab. Pacitan |
| | | 3502 | Kab. Ponorogo |
| | | 3503 | Kab. Trenggalek |
| | | 3504 | Kab. Tulungagung |
| | | 3505 | Kab. Blitar |
| | | 3506 | Kab. Kediri |
| | | 3507 | Kab. Malang |
| | | 3508 | Kab. Lumajang |
| | | 3509 | Kab. Jember |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| No. Kode | Nama Propinsi | No. Kode | Nama Kabupaten/Kota |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| | | 3510 | Kab. Banyuwangi |
| | | 3511 | Kab. Bondowoso |
| | | 3512 | Kab. Situbondo |
| | | 3513 | Kab. Probolinggo |
| | | 3514 | Kab. Pasuruan |
| | | 3515 | Kab. Sidoarjo |
| | | 3516 | Kab. Mojokerto |
| | | 3517 | Kab. Jombang |
| | | 3518 | Kab. Nganjuk |
| | | 3519 | Kab. Madiun |
| | | 3520 | Kab. Magetan |
| | | 3521 | Kab. Ngawi |
| | | 3522 | Kab. Bojonegoro |
| | | 3523 | Kab. Tuban |
| | | 3524 | Kab. Lamongan |
| | | 3525 | Kab. Gresik |
| | | 3526 | Kab. Bangkalan |
| | | 3527 | Kab. Sampang |
| | | 3528 | Kab. Pamekasan |
| | | 3529 | Kab. Sumenep |
| | | 3571 | Kota Kediri |
| | | 3572 | Kota Blitar |
| | | 3573 | Kota Malang |
| | | 3574 | Kota Probolinggo |
| | | 3575 | Kota Pasuruan |
| | | 3576 | Kota Mojokerto |
| | | 3577 | Kota Madiun |
| | | 3578 | Kota Surabaya |
| | | 3579 | Kota Batu |
| | | | |
| 3600 | Prov. Banten | 3601 | Kab. Pandeglang |
| | | 3602 | Kab. Lebak |
| | | 3603 | Kab. Tangerang |
| | | 3604 | Kab. Serang |
| | | 3671 | Kota Tangerang |
| | | 3672 | Kota Cilegon |
| | | 3673 | Kota Serang |
| | | 3674 | Kota Tangerang Selatan |
| | | | |
| 5100 | Prov. Bali | 5101 | Kab. Jembrana |
| | | 5102 | Kab. Tabanan |
| | | 5103 | Kab. Badung |
| | | 5104 | Kab. Gianyar |
| | | 5105 | Kab. Klungkung |
| | | 5106 | Kab. Bangli |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| No. Kode | Nama Propinsi | No. Kode | Nama Kabupaten/Kota |
|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | 5107 | Kab. Karang Asem |
| | | 5108 | Kab. Buleleng |
| | | 5171 | Kota Denpasar |
| | | | |
| 5200 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 5201 | Kab. Lombok Barat |
| | | 5202 | Kab. Lombok Tengah |
| | | 5203 | Kab. Lombok Timur |
| | | 5204 | Kab. Sumbawa |
| | | 5205 | Kab. Dompu |
| | | 5206 | Kab. Bima |
| | | 5207 | Kab. Sumbawa Barat |
| | | 5208 | Kab. Lombok Utara |
| | | 5271 | Kota Mataram |
| | | 5272 | Kota Bima |
| | | | |
| 5300 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 5301 | Kab. Sumba Barat |
| | | 5302 | Kab. Sumba Timur |
| | | 5303 | Kab. Kupang |
| | | 5304 | Kab. Timor Tengah Selatan |
| | | 5305 | Kab. Timor Tengah Utara |
| | | 5306 | Kab. Belu |
| | | 5307 | Kab. Alor |
| | | 5308 | Kab. Lembata |
| | | 5309 | Kab. Flores Timur |
| | | 5310 | Kab. Sikka |
| | | 5311 | Kab. Ende |
| | | 5312 | Kab. Ngada |
| | | 5313 | Kab. Manggarai |
| | | 5314 | Kab. Rote Ndao |
| | | 5315 | Kab. Manggarai Barat |
| | | 5316 | Kab. Sumba Tengah |
| | | 5317 | Kab. Sumba Barat Daya |
| | | 5318 | Kab. Nagekeo |
| | | 5319 | Kab. Manggarai Timur |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| No. Kode | Nama Propinsi | No. Kode | Nama Kabupaten/Kota |
|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | 5320 | Kab. Sabu Raijua |
| | | 5371 | Kota Kupang |
| | | | |
| 6100 | Prov. Kalimantan Barat | 6101 | Kab. Sambas |
| | | 6102 | Kab. Bengkayang |
| | | 6103 | Kab. Landak |
| | | 6104 | Kab. Pontianak |
| | | 6105 | Kab. Sanggau |
| | | 6106 | Kab. Ketapang |
| | | 6107 | Kab. Sintang |
| | | 6108 | Kab. Kapuas Hulu |
| | | 6109 | Kab. Sekadau |
| | | 6110 | Kab. Melawi |
| | | 6111 | Kab. Kayong Utara |
| | | 6112 | Kab. Kubu Raya |
| | | 6171 | Kota Pontianak |
| | | 6172 | Kota Singkawang |
| | | | |
| 6200 | Prov. Kalimantan Tengah | 6201 | Kab. Kotawaringin Barat |
| | | 6202 | Kab. Kotawaringin Timur |
| | | 6203 | Kab. Kapuas |
| | | 6204 | Kab. Barito Selatan |
| | | 6205 | Kab. Barito Utara |
| | | 6206 | Kab. Sukamara |
| | | 6207 | Kab. Lamandau |
| | | 6208 | Kab. Seruyan |
| | | 6209 | Kab. Katingan |
| | | 6210 | Kab. Pulang Pisau |
| | | 6211 | Kab. Gunung Mas |
| | | 6212 | Kab. Barito Timur |
| | | 6213 | Kab. Murung Raya |
| | | 6271 | Kota Palangka Raya |
| | | | |
| 6300 | Prov. Kalimantan Selatan | 6301 | Kab. Tanah Laut |
| | | 6302 | Kab. Kota Baru |
| | | 6303 | Kab. Banjar |
| | | 6304 | Kab. Barito Kuala |
| | | 6305 | Kab. Tapin |
| | | 6306 | Kab. Hulu Sungai Selatan |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| No. Kode | Nama Propinsi | No. Kode | Nama Kabupaten/Kota |
|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------------|
| | | 6307 | Kab. Hulu Sungai Tengah |
| | | 6308 | Kab. Hulu Sungai Utara |
| | | 6309 | Kab. Tabalong |
| | | 6310 | Kab. Tanah Bumbu |
| | | 6311 | Kab. Balangan |
| | | 6371 | Kota Banjarmasin |
| | | 6372 | Kota Banjar Baru |
| | | | |
| 6400 | Prov. Kalimantan Timur | 6401 | Kab. Paser |
| | | 6402 | Kab. Kutai Barat |
| | | 6403 | Kab. Kutai Kartanegara |
| | | 6404 | Kab. Kutai Timur |
| | | 6405 | Kab. Berau |
| | | 6406 | Kab. Malinau |
| | | 6407 | Kab. Bulungan |
| | | 6408 | Kab. Nunukan |
| | | 6409 | Kab. Penajam Paser Utara |
| | | 6410 | Kab. Tana Tidung |
| | | 6471 | Kota Balikpapan |
| | | 6472 | Kota Samarinda |
| | | 6473 | Kota Tarakan |
| | | 6474 | Kota Bontang |
| | | | |
| 7100 | Prov. Sulawesi Utara | 7101 | Kab. Bolaang Mongondow |
| | | 7102 | Kab. Minahasa |
| | | 7103 | Kab. Kepulauan Sangihe |
| | | 7104 | Kab. Kepulauan Talaud |
| | | 7105 | Kab. Minahasa Selatan |
| | | 7106 | Kab. Minahasa Utara |
| | | 7107 | Kab. Bolaang Mongondow Utara |
| | | 7108 | Kab. Siau Tagulandang Biaro |
| | | 7109 | Kab. Minahasa Tenggara |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| No. Kode | Nama Propinsi | No. Kode | Nama Kabupaten/Kota |
|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | 7110 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan |
| | | 7111 | Kab. Bolaang Mongondow Timur |
| | | 7171 | Kota Manado |
| | | 7172 | Kota Bitung |
| | | 7173 | Kota Tomohon |
| | | 7174 | Kota Kotamobagu |
| | | | |
| 7200 | Prov. Sulawesi Tengah | 7201 | Kab. Banggai Kepulauan |
| | | 7202 | Kab. Banggai |
| | | 7203 | Kab. Morowali |
| | | 7204 | Kab. Poso |
| | | 7205 | Kab. Donggala |
| | | 7206 | Kab. Toli-Toli |
| | | 7207 | Kab. Buol |
| | | 7208 | Kab. Parigi Moutong |
| | | 7209 | Kab. Tojo Una-Una |
| | | 7210 | Kab. Sigi |
| | | 7271 | Kota Palu |
| | | | |
| 7300 | Prov. Sulawesi Selatan | 7301 | Kab. Kepulauan Selayar |
| | | 7302 | Kab. Bulukumba |
| | | 7303 | Kab. Bantaeng |
| | | 7304 | Kab. Jeneponto |
| | | 7305 | Kab. Takalar |
| | | 7306 | Kab. Gowa |
| | | 7307 | Kab. Sinjai |
| | | 7308 | Kab. Maros |
| | | 7309 | Kab. Pangkajene dan Kepulauan |
| | | 7310 | Kab. Barru |
| | | 7311 | Kab. Bone |
| | | 7312 | Kab. Soppeng |
| | | 7313 | Kab. Wajo |
| | | 7314 | Kab. Sidenreng Rappang |
| | | 7315 | Kab. Pinrang |
| | | 7316 | Kab. Enrekang |
| | | 7317 | Kab. Luwu |
| | | 7318 | Kab. Tana Toraja |
| | | 7322 | Kab. Luwu Utara |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| No. Kode | Nama Propinsi | No. Kode | Nama Kabupaten/Kota |
|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | 7325 | Kab. Luwu Timur |
| | | 7326 | Kab. Toraja Utara |
| | | 7371 | Kota Makassar |
| | | 7372 | Kota Pare-Pare |
| | | 7373 | Kota Palopo |
| | | | |
| 7400 | Prov. Sulawesi Tenggara | 7401 | Kab. Buton |
| | | 7402 | Kab. Muna |
| | | 7403 | Kab. Konawe |
| | | 7404 | Kab. Kolaka |
| | | 7405 | Kab. Konawe Selatan |
| | | 7406 | Kab. Bombana |
| | | 7407 | Kab. Wakatobi |
| | | 7408 | Kab. Kolaka Utara |
| | | 7409 | Kab. Buton Utara |
| | | 7410 | Kab. Konawe Utara |
| | | 7471 | Kota Kendari |
| | | 7472 | Kota Bau-bau |
| | | | |
| 7500 | Prov. Gorontalo | 7501 | Kab. Boalemo |
| | | 7502 | Kab. Gorontalo |
| | | 7503 | Kab. Pohuwato |
| | | 7504 | Kab. Bone Bolango |
| | | 7505 | Kab. Gorontalo Utara |
| | | 7571 | Kota Gorontalo |
| | | | |
| 7600 | Prov. Sulawesi Barat | 7601 | Kab. Majene |
| | | 7602 | Kab. Polewali Mandar |
| | | 7603 | Kab. Mamasa |
| | | 7604 | Kab. Mamuju |
| | | 7605 | Kab. Mamuju Utara |
| | | | |
| 8100 | Prov. Maluku | 8101 | Kab. Maluku Tenggara Barat |
| | | 8102 | Kab. Maluku Tenggara |
| | | 8103 | Kab. Maluku Tengah |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| No. Kode | Nama Propinsi | No. Kode | Nama Kabupaten/Kota |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| | | 8104 | Kab. Buru |
| | | 8105 | Kab. Kepulauan Aru |
| | | 8106 | Kab. Seram Bagian Barat |
| | | 8107 | Kab. Seram Bagian Timur |
| | | 8108 | Kab. Maluku Barat Daya |
| | | 8109 | Kab. Buru Selatan |
| | | 8171 | Kota Ambon |
| | | 8172 | Kota Tual |
| | | | |
| 8200 | Prov. Maluku Utara | 8201 | Kab. Halmahera Barat |
| | | 8202 | Kab. Halmahera Tengah |
| | | 8203 | Kab. Kepulauan Sula |
| | | 8204 | Kab. Halmahera Selatan |
| | | 8205 | Kab. Halmahera Utara |
| | | 8206 | Kab. Halmahera Timur |
| | | 8207 | Kab. Pulau Morotai |
| | | 8271 | Kota Ternate |
| | | 8272 | Kota Tidore Kepulauan |
| | | | |
| 9100 | Prov. Papua Barat | 9101 | Kab. Fakfak |
| | | 9102 | Kab. Kaimana |
| | | 9103 | Kab. Teluk Wondama |
| | | 9104 | Kab. Teluk Bintuni |
| | | 9105 | Kab. Manokwari |
| | | 9106 | Kab. Sorong Selatan |
| | | 9107 | Kab. Sorong |
| | | 9108 | Kab. Raja Ampat |
| | | 9109 | Kab. Tambrauw |
| | | 9110 | Kab. Maybrat |
| | | 9171 | Kota Sorong |
| 9400 | Prov. Papua | 9401 | Kab. Merauke |
| | | 9402 | Kab. Jayawijaya |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

| No. Kode | Nama Propinsi | No. Kode | Nama Kabupaten/Kota |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | 9403 | Kab. Jayapura |
| | | 9404 | Kab. Nabire |
| | | 9408 | Kab. Kepulauan Yapen |
| | | 9409 | Kab. Biak Numfor |
| | | 9410 | Kab. Paniai |
| | | 9411 | Kab. Puncak Jaya |
| | | 9412 | Kab. Mimika |
| | | 9413 | Kab. Boven Digoel |
| | | 9414 | Kab. Mappi |
| | | 9415 | Kab. Asmat |
| | | 9416 | Kab. Yahukimo |
| | | 9417 | Kab. Pegunungan Bintang |
| | | 9418 | Kab. Tolikara |
| | | 9419 | Kab. Sarmi |
| | | 9420 | Kab. Keerom |
| | | 9426 | Kab. Waropen |
| | | 9427 | Kab. Supiori |
| | | 9428 | Kab. Mamberamo Raya |
| | | 9429 | Kab. Nduga |
| | | 9430 | Kab. Lanny Jaya |
| | | 9431 | Kab. Mamberamo Tengah |
| | | 9432 | Kab. Yalimo |
| | | 9433 | Kab. Puncak |
| | | 9434 | Kab. Dogiyai |
| | | 9435 | Kab. Intan Jaya |
| | | 9436 | Kab. Deiyai |
| | | 9471 | Kota Jayapura |



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 9

**DAFTAR IRTP
YANG TELAH MEMPEROLEH SPP-IRT**

| NO | NAMA DAN ALAMAT IRTP | NAMA PEMILIK | JENIS PANGAN | P-IRT NOMOR: | MEREK DAGANG (Jika ada) |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | |

.....,

DINAS KESEHATAN KAB/KOTA

KEPALA,

.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

**JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP
YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT**

I. HASIL OLAHAN DAGING KERING

1. Abon Daging
2. Dendeng Daging
3. Paru Goreng Kering
4. Kerupuk Kulit
5. Rendang Daging / Paru

II. HASIL OLAHAN IKAN KERING

1. Abon
2. Cumi Kering
3. Ikan Asin
4. Ikan Asap / Ikan Salai / Ikan Kayu
5. Kerupuk / Kemplang / Amplang Ikan
6. Udang Kering (Ebi)
7. Pasta Ikan
8. Petis
9. Terasi
10. Empek-empek kering
11. Ikan goreng
12. Dendeng Ikan
13. Rendang Ikan / Belut
14. Serundeng Ikan
15. Bekicot Olahan
16. Presto Ikan

III. HASIL OLAHAN UNGGAS KERING

1. Abon unggas
2. Usus Goreng
3. Ceker Goreng
4. Kulit unggas Goreng
5. Dendeng
6. Telur Asin
7. Presto Unggas
8. Rendang Telur

IV. SAYUR ASIN DAN SAYUR KERING

1. Acar
2. Asinan/ Manisan Sayur
3. Jamur Asin / Kering
4. Sayur Asin Kering
5. Sayur Kering
6. Keripik / Criping Sayur
7. Emping Melinjo / Labu
8. Manisan Rumput Laut

V. HASIL OLAHAN KELAPA

1. Kelapa Parut Kering
2. Nata de Coco
3. Geplak

VI. TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA

1. Bihun
2. Biskuit
3. Bagelen / Bagelan
4. Dodol / Jenang / Galamai
5. Kerupuk
6. Kue Brem
7. Kue Kering
8. Makaroni
9. Mie Kering
10. Tapioka
11. Tepung Aren
12. Tepung Arcis
13. Tepung Beras / Ketan
14. Tepung Gandum (bukan tepung terigu yang wajib SNI)
15. Tepung Hunkwee
16. Tepung Kedele
17. Tepung Kelapa
18. Tepung Kentang
19. Tepung Pisang
20. Tepung Sagu
21. Tepung Sukun
22. Roti / Bluder
23. Rempeyek / Peyek
24. Sohun
25. Bakpao
26. Bakpia / Pia
27. Bika Ambon
28. Cakue
29. Cendol
30. Cimol
31. Cone / Wadah Es Krim yang dapat dimakan (edible)
32. Kulit Lumpia / Pangsit
33. Moci

34. Molen / Bolen
35. Mutiara / Pacar Cina
36. Pilus
37. Yangko

VII. MINYAK DAN LEMAK

1. Minyak Jagung
2. Minyak Kacang
3. Minyak Kedele
4. Minyak Kelapa
5. Minyak Bunga Matahari
6. Minyak Zaitun
7. Minyak Sawit
8. Minyak/ lemak ayam
9. Minyak/ lemak sapi

VIII. SELAI, JELI DAN SEJENISNYA

1. Jem / Selai
2. Jeli buah
3. Jeli agar
4. Jeli bubuk rasa buah
5. Jeli Rumput Laut
6. Jeli Lidah Buaya
7. Marmalad
8. Serikaya / Srikaya / Kayakaya
9. Cincau

IX. GULA, KEMBANG GULA DAN MADU

1. Gula Aren
2. Gula Kelapa
3. Gula Pasir (bukan gula pasir yang dirafinasi)
4. Gula Semut
5. Kembang Gula / Permen
6. Kembang Gula / Permen Susu
7. Kembang Gula / Permen Karet
8. Kembang Gula Coklat
9. Madu
10. Sirop
11. Manisan / Aromanis (buah / rimpang)
12. Enting-enting / Kipang Kacang / Ampyang / Noga

X. KOPI, TEH, COKLAT KERING ATAU CAMPURANNYA

1. Kopi Biji Kering / Bubuk
2. Teh / Teh Hijau
3. Teh Rosela
4. Coklat (tidak termasuk coklat bubuk)
5. Kopi Campur

XI. BUMBU

1. Aneka Bumbu Masakan
2. Bumbu Cabe
3. Bawang Goreng
4. Cuka makan seperti cuka buah apel/ anggur, dll
5. Kecap Asin / Manis
6. Saos Cabe
7. Saos Tomat
8. Saos Ikan
9. Saos Kacang
10. Tauco
11. Sambal
12. Bumbu Kacang / Pecel

XII. REMPAH-REMPAH

1. Bawang Merah Kering / Pasta / Bubuk
2. Bawang Putih Kering / Pasta / Bubuk
3. Cabe Kering / Pasta / Bubuk
4. Cengkeh Kering / Pasta / Bubuk
5. Jahe Kering / Pasta / Bubuk
6. Jintan
7. Kayu Manis
8. Kapulaga
9. Ketumbar
10. Kunyit Kering / Pasta / Bubuk
11. Lada Putih / Hitam
12. Pala / Bunga Pala
13. Wijen

XIII. MINUMAN RINGAN, MINUMAN SERBUK

1. Minuman Beraroma
2. Minuman Gula Asam
3. Minuman Buah
4. Minuman Sayur
5. Minuman Kacang Kedele / Sari Kedele
6. Minuman Kopi / Campur
7. Minuman Kunyit Asam
8. Minuman Lidah Buaya
9. Minuman Rumput Laut
10. Minuman Sari Madu
11. Minuman Sari Tebu
12. Minuman Sari Jagung
13. Minuman Sari Bekatul
14. Minuman Sari Kurma
15. Minuman Teh
16. Minuman Bandrex
17. Limun
18. Minuman Jeli
19. Minuman Rempah
20. Minuman Rosela

21. Cincau / Minuman Cincau
22. Minuman Sari Tape
23. Minuman Serbuk
24. Minuman Bubuk Kedele

XIV. HASIL OLAHAN BUAH

1. Keripik / Criping Buah (Sukun/Salak/Nangka/Mangga/ Pisang, dll)
2. Buah Kering
3. Lempok Buah (Durian, dll)
4. Asinan Buah
5. Buah Kering
6. Manisan Buah
7. Buah Dalam Sirop
8. Pisang Sale

XV. HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN DAN UMBI

1. Ketan
2. Jawadah / Jadah / Uli
3. Keripik Kentang
4. Keripik kentang Balado
5. Keripik Ketela / Singkong
6. Keripik / Tortilla Jagung
7. Keripik Talas
8. Intip
9. Keripik Ubi Jalar
10. Rangginang / Batiah
11. Bekatul
12. Bingka Ubi
13. Carang mas / Kue Keremes Ubi Jalar / Ceker Ayam
14. Jipang / Kipang Beras Ketan
15. Berondong Jagung
16. Berondong Beras Ketan
17. Marning Jagung
18. Emping Jagung / Singkong
19. Keripik / Criping Umbi-umbian
20. Getuk Goreng
21. Kacang Atom / Bawang / Goreng / Kulit / Mete / Telur / Tolo / Koro / Kapri / Salut /Tumbuk
22. Kwaci
23. Opak / Gropak singkong / ubi / beras
24. Singkong Presto
25. Lanting
26. Abon Oncom
27. Tape Ketan
28. Tape Singkong
29. Tiwul
30. Wingko Babat
31. Wajik / Wajit ketan
32. Wajik / Wajit buah

XVI. LAIN-LAIN ES

1. Es Stik / Es Lilin
2. Es Goyang / Es Loly
3. Es Puter
4. Es Mambo
5. Es hunkue

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY OEMAR SAID